

URGENSI DEMOKRASI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI INDONESIA

Abdulloh Bahyras Firmansyah¹, Adhitya Raharja², Richie Anggriawanrja³
bahyrasnganjuk9265@gmail.com¹, adityaraharja3@gmail.com², richieanggriawan@gmail.com³
Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dengan menjamin partisipasi publik, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, demokrasi mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, rendahnya literasi politik, serta lemahnya penegakan hukum. Paper ini bertujuan untuk mengkaji urgensi demokrasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan menekankan prinsip-prinsip dasar demokrasi, korelasinya dengan transparansi dan akuntabilitas, serta upaya konkret untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, pembahasan difokuskan pada relevansi demokrasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak kepada rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat, Good Governance, Politik Indonesia

ABSTRACT

Democracy is a system of government that places the people as the highest sovereign, ensuring public participation, freedom of expression, and protection of human rights. In Indonesia, democracy has undergone significant development since the reform era, but its implementation still faces various challenges such as political money, low political literacy, and weak law enforcement. This paper aims to examine the urgency of democracy in creating good governance, emphasizing the fundamental principles of democracy, its correlation with transparency and accountability, as well as concrete efforts to strengthen democracy in Indonesia. Through a descriptive-qualitative approach, the discussion focuses on the relevance of democracy to the effectiveness of government administration and the importance of active community participation in the democratic process. The study's results indicate that healthy democracy is an absolute prerequisite for the establishment of a clean, efficient government that is pro-people.

Keywords: Temperature Control, Automatic Ac, Esp8266, Dht11, Ir Transmitter, Blynk.

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi aktif warga negara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan politik bukanlah hak prerogatif segelintir elite, melainkan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Demokrasi meniscayakan adanya ruang kebebasan yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengkritisi kebijakan, serta turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik (Hanafiah, 2022). Hal ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti pemilihan umum, partai politik, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian,

demokrasi tidak sekadar menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah nilai dan budaya politik yang harus terus diperjuangkan dan dijaga keberlanjutannya.

Sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai oleh transformasi besar dalam struktur dan mekanisme pemerintahan. Reformasi tersebut membawa semangat pembaruan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah penguatan sistem demokrasi. Berbagai instrumen demokrasi seperti pemilihan umum langsung untuk memilih presiden dan kepala daerah, keberadaan lembaga negara independen, serta kebebasan pers menjadi indikator kemajuan demokrasi di Indonesia. Partisipasi publik semakin meningkat, dan ruang kebebasan berpendapat menjadi lebih terbuka. Perubahan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju sistem politik yang lebih adil, transparan, dan akuntabel (Erinaldi, 2024).

Meskipun kemajuan tersebut patut diapresiasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah maraknya praktik korupsi politik yang merusak integritas institusi demokrasi. Korupsi sering kali terjadi dalam proses legislatif, eksekutif, maupun dalam kontestasi pemilu, seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, rendahnya literasi politik masyarakat juga menjadi persoalan krusial (Pito dkk., 2022). Banyak warga belum memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi, sehingga partisipasi yang dilakukan sering kali bersifat seremonial, bukan substantif. Di sisi lain, demokrasi juga terancam oleh kekuatan oligarki yang mampu mendominasi ruang-ruang kebijakan melalui pengaruh ekonomi dan politik yang kuat.

Fenomena dominasi oligarki dalam sistem demokrasi menimbulkan dilema serius dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Koho, 2021). Ketika kekuasaan dan pengaruh politik terkonsentrasi pada kelompok tertentu, kebijakan publik cenderung berpihak pada kepentingan segelintir elite dibandingkan pada kepentingan rakyat banyak. Situasi ini melemahkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan partisipasi inklusif. Akibatnya, terjadi jarak antara penguasa dan rakyat, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat proses konsolidasi demokrasi dan menciptakan instabilitas sosial politik.

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji ulang peran demokrasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Demokrasi yang sehat seharusnya mendorong adanya transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas pejabat publik, serta keterlibatan aktif warga negara dalam proses pemerintahan. *Good governance* tidak akan mungkin tercapai tanpa landasan demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik (Zahran dkk., 2025). Oleh karena itu, penguatan institusi demokrasi, reformasi birokrasi, dan pendidikan politik masyarakat menjadi langkah strategis untuk mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan berintegritas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara demokrasi dan *good governance* di Indonesia?
2. Apa saja tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam penguatan demokrasi di era kontemporer?
3. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam praktik ketatanegaraan?
4. Bagaimana masyarakat sipil dapat memainkan peran lebih aktif dalam mendorong

pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab?

Tujuan Masalah

1. Mengkaji secara kritis hubungan antara demokrasi dan good governance di Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam penguatan demokrasi di era kontemporer
3. Memahami prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam praktik ketatanegaraan.
4. Mengetahui masyarakat sipil dapat memainkan peran lebih aktif dalam mendorong pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab

Landasan Teori

1. Konsep Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam pemahaman klasik, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih melalui mekanisme pemilu. Dalam pandangan modern, seperti yang dikemukakan oleh (I. N. Pratama dkk., 2024), demokrasi tidak sekadar menyangkut prosedur elektoral semata, melainkan juga mencakup jaminan terhadap hak-hak sipil, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Demokrasi yang sehat meniscayakan adanya sistem yang terbuka dan transparan, di mana kebijakan publik dapat dikritisi, dikoreksi, dan dipengaruhi oleh kehendak rakyat melalui mekanisme partisipatif.

Lebih lanjut, demokrasi menekankan pentingnya kesetaraan dalam hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong proses deliberatif sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang inklusif. Demokrasi bukan hanya sistem politik, melainkan juga budaya politik yang menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, empati sosial, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas institusi formal seperti parlemen dan pemilu, tetapi juga oleh tingginya kualitas kesadaran politik masyarakat. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi menjadi medan perjuangan antara idealisme kedaulatan rakyat dan realitas politik transaksional, sehingga pemahaman mendalam terhadap konsep demokrasi menjadi sangat penting untuk menjaga substansinya.

2. Good Governance

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, adil, partisipatif, dan transparan. Good governance meliputi delapan karakteristik utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas (Rusdy & Flambonita, 2023). Dalam konteks negara demokrasi, prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan karena menyokong pelaksanaan fungsi pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak dan kepentingan rakyat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, kebijakan berbasis data, dan pelayanan publik yang adil merupakan indikator dari keberhasilan good governance.

Sementara itu, dalam praktiknya, good governance menuntut adanya sinergi antara berbagai aktor, baik negara, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Pemerintah yang berkomitmen pada tata kelola yang baik harus membuka ruang dialog dengan warga, melibatkan publik dalam proses perencanaan kebijakan, dan menyediakan akses terhadap informasi secara terbuka. Ketika prinsip good governance diterapkan secara konsisten,

hasilnya tidak hanya berupa meningkatnya kepercayaan publik terhadap negara, tetapi juga mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, demokrasi dan good governance merupakan dua pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan negara yang adil dan sejahtera.

3. Hubungan antara Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik memiliki hubungan kausal yang saling menguatkan. Demokrasi yang sehat memberikan dasar bagi penerapan good governance karena menyediakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan serta menjamin hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil dan harus bersedia dikritisi serta diawasi oleh publik. Negara-negara dengan sistem demokrasi yang mapan cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah, birokrasi yang efisien, serta layanan publik yang merata (Jati, 2021). Hal ini membuktikan bahwa demokrasi yang substantif dapat mendorong lahirnya pemerintahan yang berkualitas.

Namun demikian, demokrasi juga bukan jaminan otomatis bagi terciptanya tata kelola yang baik. Tanpa penguatan institusi, pendidikan politik masyarakat, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif, demokrasi dapat terjebak dalam proseduralisme semu. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih ditemukan praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang meski proses pemilu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat menentukan arah dan substansi good governance. Jika demokrasi hanya dijalankan secara simbolik tanpa pelembagaan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi, maka pemerintahan tetap akan berjalan secara otoriter meskipun dibungkus dengan legitimasi elektoral.

4. Partisipasi Politik dan Kesadaran Demokratis

Partisipasi politik merupakan elemen vital dalam sistem demokrasi yang sehat. Partisipasi politik ke dalam beberapa bentuk seperti pemilihan umum, petisi, demonstrasi, dan keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik (Susilawati, 2023). Partisipasi tersebut mencerminkan kesadaran politik masyarakat dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Meningkatnya partisipasi politik menandakan berkembangnya demokratisasi yang lebih substansial, di mana warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam pengambilan keputusan publik.

Namun, partisipasi yang bermakna tidak dapat terjadi tanpa didukung oleh tingkat literasi politik yang tinggi. Literasi politik adalah pemahaman individu terhadap struktur, proses, dan nilai-nilai politik yang memandu sistem pemerintahan (Mundakir & Fitri, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi alat penting untuk membentuk warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya dalam sistem demokrasi. Kurangnya literasi politik menyebabkan masyarakat mudah dimanipulasi oleh politik uang, hoaks, atau propaganda, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, meningkatkan literasi politik masyarakat, terutama generasi muda, menjadi tugas strategis dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dan memperkuat kualitas partisipasi publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami secara mendalam konsep,

dinamika, serta implementasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan (*good governance*) di Indonesia melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur. Data yang dikumpulkan bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA dan internasional (2020–2025), buku-buku ilmiah, laporan lembaga negara seperti KPU dan Bappenas, serta dokumen kebijakan dan laporan organisasi internasional seperti UNDP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), yang mengorganisasi data berdasarkan tema-tema kunci seperti prinsip demokrasi, peran partisipasi politik, dan penerapan prinsip *good governance*. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran konseptual dan empiris mengenai tantangan serta peluang penguatan demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Salah satu prinsip paling fundamental dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh bentuk kekuasaan politik harus berasal dari dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Di Indonesia, prinsip ini direalisasikan melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti pemilihan umum langsung untuk memilih presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Selain itu, masyarakat juga memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi politik, seperti partai politik dan organisasi masyarakat sipil. Keberadaan mekanisme tersebut memungkinkan rakyat untuk secara langsung menentukan arah kebijakan negara serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat publik.

Prinsip kedua yang sangat penting dalam demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi karena melalui proses inilah rakyat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung. Namun, untuk menjamin efektivitas dan legitimasi dari proses pemilu, maka pelaksanaannya harus memenuhi standar kebebasan dan keadilan (Karyudi & Firdausiah, 2024). Ini berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya intimidasi, kecurangan, atau manipulasi. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu diatur oleh lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas menjaga integritas dan transparansi proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, diskriminasi, dan mobilisasi berbasis identitas masih menjadi persoalan yang perlu terus diselesaikan agar kualitas demokrasi semakin membaik.

Demokrasi yang sehat juga sangat bergantung pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Supremasi hukum menjadi prasyarat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah maupun pihak lain. Dalam demokrasi, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, melainkan harus berdiri di atas semua elemen negara secara adil dan objektif. Perlindungan HAM menjadi cerminan dari keberpihakan negara terhadap martabat manusia, serta menjadi parameter keberhasilan sistem demokrasi dalam menjamin kebebasan individu dan keadilan sosial. Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk menjamin hak-hak dasar warga, namun implementasi di lapangan masih sering diwarnai pelanggaran, baik oleh aparat maupun institusi negara lainnya. Oleh karena itu, penguatan lembaga peradilan dan

lembaga HAM menjadi sangat krusial dalam menopang demokrasi konstitusional.

Demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sebagai indikator vital dari kualitas kehidupan politik suatu negara. Kebebasan berpendapat memungkinkan warga negara menyampaikan gagasan, kritik, serta partisipasi politiknya tanpa rasa takut atau tekanan (Nasution & Dianto, 2023). Sementara itu, kebebasan pers memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi secara objektif dan menjadi pengawas terhadap kekuasaan negara. Di era digital saat ini, media massa dan media sosial semakin memperluas ruang diskusi publik dan memperkuat transparansi pemerintahan. Di Indonesia, meskipun kebebasan pers secara hukum dijamin, faktanya tidak sedikit kasus intimidasi terhadap jurnalis, penyensoran berita, hingga kriminalisasi terhadap aktivis atau warga yang menyuarakan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan iklim kebebasan yang sehat dan bertanggung jawab.

Keseluruhan prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut kedaulatan rakyat, pemilu yang bebas dan adil, penegakan hukum dan HAM, serta kebebasan pers dan berpendapat merupakan pilar yang saling menopang satu sama lain. Demokrasi tidak akan dapat berjalan secara utuh dan substansial apabila salah satu pilar ini melemah. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama dari semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga negara, partai politik, media, hingga masyarakat sipil, untuk terus memperjuangkan dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Penguatan pendidikan politik, reformasi kelembagaan, serta keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan dan kebebasan menjadi prasyarat penting dalam membangun demokrasi yang kokoh dan bermartabat di Indonesia.

2. Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat. Demokrasi menyediakan kerangka dasar yang memungkinkan terjadinya pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Prinsip-prinsip demokrasi menuntut adanya kekuasaan yang dikendalikan oleh hukum dan akuntabilitas kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya soal mekanisme pemilu, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan dengan prinsip etika dan keadilan untuk memenuhi kepentingan publik. Di negara demokratis seperti Indonesia, *good governance* menjadi orientasi utama dalam reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Salah satu elemen paling krusial dalam hubungan antara demokrasi dan *good governance* adalah transparansi. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut untuk membuka akses informasi kepada publik secara luas dan jelas. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui proses-proses penting dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program-program publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, warga negara dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara objektif. Di Indonesia, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) menjadi salah satu instrumen hukum yang memperkuat prinsip ini. Namun demikian, praktiknya masih sering dihadapkan pada hambatan birokrasi, kerahasiaan berlebihan, serta kurangnya literasi masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi pilar utama dalam demokrasi yang sehat. Pejabat publik yang terpilih melalui proses demokratis harus mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan tindakan mereka kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, sistem pengawasan baik internal maupun eksternal harus berjalan dengan efektif (Kristian dkk., 2024). Lembaga-lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Namun akuntabilitas tidak hanya menyangkut lembaga formal, tetapi juga kontrol publik melalui media, LSM, dan masyarakat umum. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin besar pula kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Prinsip partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan juga merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi dan tata kelola yang baik. Demokrasi sejati bukan hanya memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik (Aprillia & Usman, 2023). Bentuk partisipasi ini bisa berupa konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, forum warga, hingga penggunaan teknologi digital untuk menjangkau aspirasi. Partisipasi yang luas dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkecil kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Namun, partisipasi yang ideal memerlukan masyarakat yang memiliki kapasitas kritis, akses informasi, dan jaminan perlindungan hak untuk menyuarakan pendapatnya.

Di samping itu, efisiensi dan responsivitas juga menjadi karakter penting dari pemerintahan demokratis. Efisiensi menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara optimal, menghindari pemborosan anggaran, serta menyelenggarakan layanan publik dengan kualitas yang baik. Sementara responsivitas mengacu pada kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat. Demokrasi memberi ruang yang besar bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah mereka, namun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meresponsnya secara cepat dan memadai. Oleh karena itu, tata kelola yang baik memerlukan sistem administrasi yang modern, SDM aparatur yang kompeten, serta kemauan politik yang kuat untuk mendengarkan dan bertindak berdasarkan suara rakyat.

Keterkaitan antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan bahwa pembangunan institusi demokrasi tidak bisa dipisahkan dari upaya memperkuat kapasitas negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Demokrasi yang hanya bersifat prosedural, tanpa diiringi dengan manajemen pemerintahan yang baik, berisiko melahirkan kekecewaan publik dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem politik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi substantif melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan responsivitas perlu dijadikan prioritas dalam reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sinergi antara masyarakat sipil, lembaga negara, dan sektor swasta dalam menciptakan iklim pemerintahan yang demokratis dan profesional akan menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

3. Tantangan Demokrasi di Indonesia

Salah satu tantangan utama dalam demokrasi Indonesia adalah dominasi politik uang dan kekuatan oligarki yang kian mengakar dalam setiap tahapan pemilu. Meskipun pemilihan umum telah dilaksanakan secara langsung, bebas, dan terbuka sejak era reformasi, praktik-praktik transaksional masih mewarnai proses elektoral. Politik uang, baik dalam bentuk pembagian uang tunai, sembako, hingga janji-janji proyek, menciptakan relasi yang timpang antara calon pemimpin dan rakyat. Situasi ini diperparah oleh kekuatan oligarki yang menguasai sumber daya ekonomi dan media, sehingga mengendalikan wacana publik serta memanipulasi preferensi pemilih. Alhasil, demokrasi

menjadi sekadar prosedur formil yang dikuasai oleh segelintir elite, bukan lagi ruang partisipasi sejati bagi seluruh rakyat. Kondisi ini melemahkan substansi demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang lebih loyal kepada kepentingan modal daripada aspirasi masyarakat luas.

Rendahnya literasi politik masyarakat juga menjadi tantangan krusial yang menghambat kematangan demokrasi di Indonesia. Banyak warga negara belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi, termasuk makna partisipasi politik yang konstruktif. (A. F. Pratama dkk., 2022) Minimnya pemahaman ini menciptakan kondisi di mana masyarakat mudah terjebak dalam politik identitas, pragmatisme pemilu, atau bahkan apatisme terhadap proses politik. Di berbagai daerah, partisipasi pemilih cenderung didorong oleh iming-iming materi atau pengaruh tokoh karismatik, bukan melalui kesadaran politik yang rasional. Padahal, keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kualitas partisipasi warga. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berkelanjutan dan kontekstual harus menjadi prioritas, baik melalui jalur formal seperti kurikulum sekolah maupun jalur informal seperti diskusi publik dan pelatihan masyarakat sipil.

Kemajuan teknologi informasi yang seharusnya memperkuat demokrasi justru membawa ancaman disinformasi digital yang serius. Media sosial sebagai ruang komunikasi publik kini sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik yang memecah belah masyarakat. Fenomena ini semakin parah menjelang pemilu, di mana narasi kebohongan digunakan untuk menjatuhkan lawan politik atau memanipulasi persepsi publik. Disinformasi ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga melemahkan demokrasi deliberatif yang seharusnya didasarkan pada pertukaran gagasan rasional (Evanalia, 2022). Ditambah dengan rendahnya literasi digital masyarakat, informasi palsu dengan mudah menyebar tanpa penyaringan kritis. Untuk itu, peran negara, platform digital, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem informasi yang sehat sangatlah penting demi menjaga kualitas demokrasi.

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi persoalan serius dalam pembangunan demokrasi yang berkeadilan. Ketika hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan tergerus. Di Indonesia, berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh elite politik seringkali tidak mendapat sanksi tegas, sementara masyarakat biasa mendapat hukuman berat atas pelanggaran kecil. Ketimpangan ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lemahnya integritas aparat penegak hukum, campur tangan kekuasaan dalam proses peradilan, serta masih maraknya praktik suap dan gratifikasi semakin memperburuk keadaan. Untuk membangun demokrasi yang kredibel, sistem hukum harus ditegakkan secara independen, transparan, dan tidak pandang bulu.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang bersifat struktural dan kultural. Demokrasi yang ideal bukan hanya ditandai oleh keberlangsungan pemilu, tetapi juga oleh kualitas institusi, partisipasi publik yang bermakna, serta keberpihakan terhadap keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, penguatan demokrasi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan reformasi formal, tetapi juga memerlukan perubahan budaya politik, pemberdayaan masyarakat, dan reformasi sistemik dalam penegakan hukum dan distribusi kekuasaan. Tanpa upaya yang serius dan menyeluruh, demokrasi Indonesia berisiko terjebak dalam stagnasi atau bahkan kemunduran. Maka, seluruh elemen bangsa perlu bergandengan tangan untuk menjaga, memperbaiki, dan memperkuat fondasi demokrasi

demokrasi masa depan yang lebih adil dan inklusif.

4. Upaya Penguatan Demokrasi

Penguatan demokrasi di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan strategi menyeluruh, melibatkan berbagai aktor serta pendekatan sistemik. Salah satu aspek paling mendasar dalam memperkuat demokrasi adalah melalui pendidikan politik yang berkelanjutan. Masyarakat perlu dibekali pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan elektoral, tetapi juga membentuk kesadaran kritis terhadap proses kebijakan publik, etika dalam berdemokrasi, serta pentingnya keterlibatan dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan politik yang efektif harus dimulai sejak usia dini melalui kurikulum sekolah dan diperkuat dengan forum-forum diskusi di ruang publik. Selain itu, partisipasi aktif dalam organisasi masyarakat, kegiatan pemuda, dan kelompok diskusi dapat menjadi wahana bagi masyarakat untuk mengasah kepekaan terhadap isu-isu politik dan sosial yang relevan.

Upaya lain yang tak kalah penting adalah reformasi partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Partai politik di Indonesia saat ini masih banyak yang berfungsi sebagai alat elektoral semata, bukan sebagai lembaga kaderisasi yang kuat dan tempat artikulasi aspirasi rakyat. Reformasi partai perlu diarahkan pada pembenahan struktur internal partai, penerapan mekanisme demokrasi internal yang transparan, serta peningkatan integritas dan kompetensi kader. Partai harus menjadi sarana yang mampu menghubungkan rakyat dengan pemerintah melalui formulasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (Haris, 2020). Selain itu, sistem pendanaan partai juga perlu diperkuat dan diawasi secara ketat agar tidak bergantung pada donatur besar yang berpotensi menciptakan oligarki politik. Dengan partai yang sehat, maka proses rekrutmen politik akan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Di era digital seperti saat ini, demokrasi memiliki peluang besar untuk diperkuat melalui digitalisasi sistem politik secara positif. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, misalnya melalui sistem e-voting, e-participation, dan keterbukaan informasi anggaran publik. Digitalisasi memungkinkan warga terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan tanpa terbatas oleh jarak geografis. Pemerintah dapat membangun platform digital yang bersifat interaktif dan transparan sebagai sarana konsultasi publik, pengajuan aspirasi, dan monitoring kinerja pejabat publik. Namun demikian, transformasi digital ini harus diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat serta perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan informasi. Regulasi yang adaptif dan perlindungan terhadap hak digital warga negara juga harus menjadi prioritas dalam mengembangkan demokrasi digital yang inklusif.

Peran masyarakat sipil sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas demokrasi. Organisasi masyarakat sipil seperti LSM, komunitas aktivis, akademisi, dan media memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi pengawas independen terhadap jalannya pemerintahan. Mereka dapat melakukan advokasi terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, menginisiasi gerakan-gerakan sosial, dan menyediakan ruang alternatif bagi partisipasi masyarakat. Akademisi juga berperan penting dalam menyediakan kajian kritis yang berbasis riset untuk memperkaya wacana publik. Di sisi lain, media sebagai pilar keempat demokrasi perlu menjaga independensinya dari intervensi politik dan kepentingan modal. Dengan peran yang aktif dan konstruktif dari

masyarakat sipil, demokrasi tidak akan dikuasai sepenuhnya oleh elite politik, tetapi tetap menjadi milik rakyat.

Penguatan demokrasi juga harus melibatkan reformasi birokrasi dan aparatur negara agar lebih profesional, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik. Demokrasi akan sulit berkembang apabila institusi pemerintahan masih dikendalikan oleh kepentingan politik praktis atau dipenuhi oleh praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Birokrasi yang netral akan menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan publik tidak dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa, tetapi berdasarkan asas keadilan dan efektivitas. Selain itu, penguatan sistem merit dalam perekrutan ASN dan pemberdayaan sistem pengawasan internal seperti Inspektorat dan Ombudsman dapat memperkuat akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan bagian integral dari demokrasi substantif, karena menyangkut kualitas penyelenggaraan negara secara langsung (Sumantri, 2022).

Upaya penguatan demokrasi harus diiringi dengan perlindungan terhadap kelompok rentan dan marjinal dalam kehidupan politik. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang inklusif, yang memberikan ruang setara kepada perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hukum, afirmasi kebijakan, serta pemberdayaan komunitas-komunitas ini perlu terus dikembangkan agar tidak terjadi eksklusi sosial-politik. Representasi kelompok rentan dalam lembaga legislatif, partai politik, dan forum-forum publik menjadi indikator penting dari demokrasi yang berkeadilan. Ketika demokrasi hanya menguntungkan kelompok mayoritas atau elite tertentu, maka esensi dari kedaulatan rakyat menjadi timpang dan diskriminatif.

Demokrasi yang kuat juga membutuhkan dukungan budaya politik yang sehat. Budaya politik yang rasional, terbuka, dan menghargai perbedaan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan demokrasi. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, nilai-nilai toleransi, gotong royong, serta musyawarah harus terus dipelihara. Budaya politik yang dewasa akan mendorong diskursus publik yang bermutu dan menghindari praktik-praktik kekerasan atau intimidasi dalam kehidupan politik. Pendidikan karakter, pembudayaan nilai-nilai Pancasila, serta pelibatan tokoh agama dan adat dalam pembangunan demokrasi menjadi langkah penting untuk membentuk budaya politik yang beradab dan etis.

Akhirnya, penguatan demokrasi tidak akan berhasil tanpa komitmen bersama antara negara dan warga negara. Negara bertanggung jawab menciptakan regulasi yang mendukung sistem politik yang terbuka dan adil, sementara warga negara harus aktif dan kritis dalam mengawal pelaksanaannya. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi prinsip utama dalam kehidupan demokratis. Demokrasi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban bukan hanya soal memilih, tetapi juga mengawasi dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Dengan kerja sama lintas sektor, generasi, dan komunitas, demokrasi Indonesia dapat terus diperkuat dan berkembang menjadi sistem yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat.

KESIMPULAN

Demokrasi sejatinya bukan sekadar sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi merupakan proses politik yang dinamis dan terus berkembang. Demokrasi menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan mengawalinya dari berbagai bentuk penyimpangan. Di Indonesia, pasca-reformasi 1998 telah terjadi lompatan signifikan dalam pelebagaan nilai-nilai

demokrasi, seperti pemilihan umum langsung, kebebasan berekspresi, dan hadirnya lembaga-lembaga pengawas independen. Namun demikian, perkembangan demokrasi ini masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menyentuh aspek substantif seperti keadilan sosial, inklusi politik, dan distribusi kekuasaan yang merata. Oleh karena itu, demokrasi harus terus diperjuangkan sebagai nilai hidup berbangsa, bukan hanya sebagai rutinitas elektoral belaka.

Salah satu ukuran utama keberhasilan demokrasi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang demokratis bukan hanya mengutamakan legitimasi politik, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, penguatan demokrasi harus dilakukan secara simultan antara pembenahan kelembagaan negara dan peningkatan kapasitas warga negara. Lembaga-lembaga negara perlu memperkuat integritas, efektivitas, dan independensinya dari intervensi politik dan ekonomi yang destruktif. Sementara itu, masyarakat juga harus terus didorong untuk memainkan peran aktif dalam merumuskan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan publik demi memastikan bahwa kekuasaan benar-benar dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penting untuk disadari bahwa demokrasi tidak akan tumbuh subur tanpa kehadiran masyarakat sipil yang kuat dan sehat. Keterlibatan LSM, akademisi, media, komunitas adat, organisasi keagamaan, serta kelompok-kelompok pemuda menjadi penopang vital dalam menyeimbangkan kekuasaan dan memperluas ruang partisipasi. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai penyalur aspirasi, agen kontrol sosial, hingga katalisator perubahan kebijakan. Dalam era digital, peran masyarakat sipil pun semakin luas dengan adanya teknologi informasi yang memungkinkan pengawasan publik dan advokasi dilakukan secara lebih cepat dan luas. Namun demikian, kekuatan masyarakat sipil ini tetap perlu diarahkan dengan cara-cara konstitusional dan bermoral agar tidak justru menjadi alat polarisasi atau propaganda kelompok kepentingan tertentu.

Dengan demikian, upaya menegakkan demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia memerlukan komitmen kolektif dan kerja sama lintas sektor. Negara harus menyediakan jaminan hukum, kebebasan sipil, dan infrastruktur demokrasi yang adil dan merata, sementara masyarakat harus mengisi ruang demokrasi itu dengan kesadaran kritis, partisipasi aktif, dan semangat kebangsaan. Demokrasi tidak bisa diserahkan hanya pada aktor politik dan institusi negara, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Hanya dengan cara demikian, demokrasi Indonesia akan tumbuh menjadi sistem yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga menjamin keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA .

- Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh Peran Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah. *Jurnalku*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.600>
- Erinaldi. (2024). Politik Identitas dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1–13. <https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.244>
- Evanalia, S. (2022). Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 32–43. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.86>
- Hanafiah, R. (2022). HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.151>

- Haris, S. (2020). Menuju Reformasi Partai Politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Jati, W. R. (2021). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 202. *THC INSIGHTS*, 1(27), 1–6.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Et Lustitia*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.72>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60–73. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2024). PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG). *Jurnal Academia Praja : Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i2.2837>
- Mundakir, A., & Fitri, D. A. (2024). PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGUATAN DEMOKRASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA. *Dinamika Hukum*, 25(2), 225–236. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.9948>
- Nasution, I., & Dianto, I. (2023). Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi. *Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 1(1), Article 1.
- Pito, T. A., Efriza, & Fasyah, K. (2022). Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi (5 ed.). Penerbit Nuansa Cendekia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=O2ykEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Korupsi+Politik+dalam+Sistem+Demokrasi&ots=ruiqrZWVvZ&sig=2onhis1J22fccBBMW1hOeLQGyyQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Korupsi%20Politik%20dalam%20Sistem%20Demokrasi&f=false
- Pratama, A. F., Juwandi, R., & Bahrudin, F. A. (2022). Pengaruh Literasi Politik dan Informasi Hoax terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Journal of Civic Education*, 5(1), 11–24. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i1.662>
- Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), Article 11. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Lex LATA*, 5(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), Article 2.
- Susilawati, Y. (2023). PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN POLARISASI PARTAI POLITIK PADA MASA PEMILU 2024. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2025). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *Journal of Constitutional, Law and Human Rights*, 1(1), 21–25.